



Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan

Buffon Yoppy Trie Ambodo^{1*}, Anggraeny Puspaningtyas², Supri Hartono³

¹⁻³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: buffonyoppyta@gmail.com¹, anggraenypuspa@untag-sby.ac.id², suprihartono@untag-sby.ac.id³

*Penulis Korespondensi: buffonyoppyta@gmail.com

Abstract. *One of the key strategic sectors that contributes significantly to driving economic growth, improving community welfare, and strengthening regional development is tourism. Pacitan Regency possesses significant potential in natural tourism, cultural tourism, and the creative economy; however, its development still faces various challenges, including limited infrastructure, accessibility issues, and coordination among stakeholders. The application of collaborative governance in Pacitan Regency's tourist growth is the main subject of this study, which also looks at the enabling and impeding variables. A descriptive qualitative approach is used in the study. Data were obtained through interviews, observations, documentation, and document studies, and were subsequently analyzed by applying the Miles and Huberman interactive model. Ansell and Gash's Collaborative Governance model, which incorporates initial contextual factors, facilitative leadership, institutional design, and the collaborative process, served as the foundation for the analysis. The findings suggest that collaborative governance in tourism development in Pacitan Regency has been implemented relatively well. The Department of Tourism, Culture, Youth, and Sports plays an active role as a facilitator of collaboration, supported by clear regulations, regular coordination forums, and the involvement of government agencies, tourism awareness groups (Pokdarwis), business actors, the media, and local communities. The main supporting factors are the region's substantial tourism potential and the established cooperation among stakeholders, while the inhibiting factors include differences in perspectives among actors and limitations in infrastructure. This study implies the importance of strengthening stakeholder synergy, enhancing community capacity, and improving infrastructure development to achieve sustainable tourism development in Pacitan Regency.*

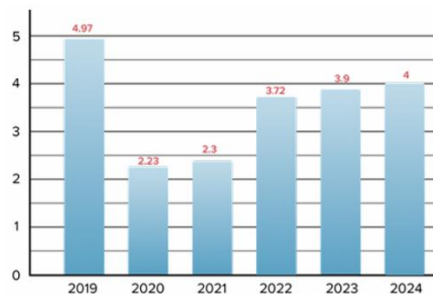
Keywords: *Ansell and Gash; Collaborative Governance; Pacitan Regency; Stakeholders; Tourism Development.*

Abstrak. Pariwisata adalah salah satu industri strategi yang memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan daerah. Kabupaten Pacitan memiliki potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang besar, namun pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta koordinasi antar pelaku kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan dilakukan melalui kerja sama pemerintahan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi dokumen, kemudian dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis dilakukan berdasarkan model *Collaborative Governance* Ansell & Gash yang terdiri atas kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan telah diimplementasikan dengan cukup baik. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga berperan aktif sebagai pihak yang memfasilitasi kolaborasi, didukung oleh regulasi yang jelas, forum koordinasi rutin, serta keterlibatan pemerintah, Pokdarwis, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Faktor pendukung utama adalah besarnya potensi wisata serta terjalannya kerja sama antar *stakeholder*, sedangkan faktor penghambat meliputi perbedaan pola pikir antar aktor dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan sinergi *stakeholder*, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pembangunan infrastruktur guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Pacitan.

Kata kunci: Ansell dan Gash; *Collaborative Governance*; Kabupaten Pacitan; Pemangku Kepentingan; Pengembangan Pariwisata.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam yang beragam serta budaya dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai wilayah (Savitri et al., 2024). Keanekaragaman tersebut mendorong sektor pariwisata sebagai sektor potensi unggulan yang berpotensi mendorong pembangunan nasional serta daerah (Akbar et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata memiliki peran yang strategis, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat identitas bangsa. Selain menjadi sumber devisa negara, pariwisata turut berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi wisata (Nugraha et al., 2023).



Gambar 1. Data Kontribusi Pariwisata terhadap PDB
Sumber: (Kemenpar, 2025).

Pada perkembangan sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren yang baik selama beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perjalanan wisata terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025 (Alamsyah et al., 2019). Peningkatan tersebut juga diikuti oleh pulihnya devisa pariwisata pasca pandemi Covid-19 yang kembali mendekati capaian sebelum pandemi (Putra et al., 2022). Selain itu, peran sektor pariwisata pada Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional terus memperlihatkan adanya perkembangan sehingga menegaskan pentingnya sektor ini sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional (Septiana, 2025).

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu yang memiliki banyak peluang pariwisata. Berdasarkan data BPS tahun 2025, Jawa Timur menempati posisi sebagai provinsi dengan jumlah perjalanan wisatawan dalam negeri tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut didukung oleh keberagaman destinasi wisata alam, budaya, maupun sejarah yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota (Hanaf, 2022). Infrastruktur yang cenderung memadai serta mendukung regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah juga berperan sebagai faktor yang mendorong perkembangan sektor pariwisata di Jawa Timur (Ismail et al., 2023).

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan (Perjalanan).

Provinsi	2022	2023	2024	2025
Jawa Tengah	110.345.715	115.570.236	146.842.040	146.253.837
Daerah Yogyakarta	25.743.390	30.437.069	38.030.739	40.592.837
Jawa Timur	200.548.137	207.104.573	218.711.181	217.197.652
Banten	38.597.642	44.399.501	48.257.848	62.556.582
Bali	14.259.714	20.833.503	22.664.939	26.615.306
Nusa Tenggara Barat	4.091.259	12.922.404	13.769.746	14.848.407
Nusa Tenggara	3.849.353	5.064.324	7.983.247	10.401.869
Kalimantan Barat	3.279.863	4.711.038	8.165.686	13.192.118
Kalimantan Tengah	2.683.604	4.023.322	6.499.070	11.298.337
Kalimantan Selatan	5.310.737	7.869.846	11.668.618	19.017.247
Kalimantan Timur	5.431.717	7.903.336	12.205.958	15.683.381

Sumber : Data Badan Pusat Statistika Indonesia, 2026.

Di antara berbagai daerah wisata di Jawa Timur, Kabupaten Pacitan menjadi salah satu daerah yang menyimpan beragam potensi wisata alam yang melimpah. Kabupaten yang dikenal dengan julukan *Paradise of Java* ini memiliki lebih dari 50 pantai, puluhan goa alam, serta berbagai destinasi wisata pegunungan yang menjadi daya tarik wisatawan. Destinasi unggulan seperti Pantai Klayar, Pantai Watu Karung, Goa Gong, dan Sungai Maron telah menjadi ikon pariwisata Kabupaten Pacitan. Selain itu, pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata melalui berbagai program promosi, pengembangan kawasan strategis pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai event budaya dan wisata (Saputra et al., 2022).

Walaupun memiliki potensi yang cukup besar, perkembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Data kunjungan wisatawan memperlihatkan bahwa jumlah wisatawan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 19,11 persen daripada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada kategori wisata pantai maupun wisata non pantai. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya potensi wisata yang dimiliki belum sepenuhnya mampu dioptimalkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan (Moreta & MS, 2023).

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2024, beberapa problem yang masih dihadapi antara lain belum optimalnya fasilitas destinasi wisata, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, aksesibilitas menuju lokasi wisata yang belum merata, serta keterbatasan jaringan telekomunikasi bagi beberapa objek wisata. Permasalahan tersebut bukan hanya berpengaruh pada kenyamanan wisatawan, sekaligus berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata (Supriyanto et al., 2024).

Upaya pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara mandiri, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak (Putri et al., 2024). Di Kabupaten Pacitan, pengembangan pariwisata telah berkolaborasi bersama unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan program pengabdian masyarakat, pelaku usaha menyediakan fasilitas dan layanan wisata, komunitas seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan destinasi, sementara media berfungsi sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi wisata (Supriyanto et al., 2024).

Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya praktik *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata (Wibowo & Belia, 2023). Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah proses kolaborasi antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan untuk menangani permasalahan publik secara bersama-sama (Yasintha, 2020). Pendekatan ini dinilai relevan untuk menjawab berbagai tantangan pengembangan pariwisata yang kompleks dan membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Namun demikian, efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi hal yang perlu dikaji lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan penting dilakukan untuk memahami bagaimana proses kolaborasi berlangsung, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Pacitan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pada kerangka dalam penelitian ini adalah *Collaboartive Governance* mengacu pada kerangka yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, (2008) untuk membangun kerangka tata kelola kolaboratif. Menurut model ini, empat indikator utama yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi: kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, dan kolaboratif. Keempat elemen ini saling berhubungan untuk membentuk tata kelola kolaboratif yang efektif untuk menyelesaikan masalah publik yang melibatkan banyak pihak.

Penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan wisata di kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat” yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2023) menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat sejauh

mana kerja sama pemerintahan dilaksanakan terkait pengembangan wisata di Kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya pengembangan pariwisata belum mencapai hasil yang efektif, seperti yang terlihat dari lemahnya struktur jaringan kolaborasi, belum adanya tujuan bersama yang jelas, rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor, serta belum maksimalnya proses berbagi informasi. Selain itu, keterbatasan akan sumber daya dan infrastruktur menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata, meskipun pembagian tugas antar aktor dan peran Dinas Pariwisata sebagai koordinator telah berjalan cukup baik.

Penelitian ini dan penelitian berikutnya sama-sama melihat kerja sama pemerintahan dalam industri pariwisata dengan melibatkan berbagai aktor terkait seperti, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian ini juga berfokus pada pentingnya kolaborasi antar aktor untuk mendukung pengembangan destinasi wisata daerah.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi dan fokus kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan dengan menggunakan model Ansell & Gash, (2008), serta melihat faktor pendukung dan penghambat keberhasilan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata daerah.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2019). Penelitian berfokus pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan dengan mengacu pada model Ansell & Gash, (2008) yang terdiri atas empat aspek, yaitu kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, dan kolaboratif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pacitan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan sektor pariwisata, yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, media, dan akademisi. Data penelitian terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen perencanaan daerah, laporan statistik pariwisata, RPJMD, Renstra Dinas Pariwisata, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Dengan menggunakan model interaktif, analisis data

mencakup pengumpulan, reduksi dan penyajian data. Selain itu, kesimpulan yang dijelaskan oleh Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2019). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pacitan

Kondisi Awal

Kondisi awal pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya potensi wisata yang besar, namun belum sepenuhnya dikelola secara maksimal. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata. Pada tahap awal, pemerintah melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga berperan sebagai aktor utama yang mengelola sejumlah destinasi wisata serta melaksanakan pembangunan sarana dan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, pemerintah tidak dapat menjalankan proses pengembangan pariwisata secara mandiri karena keterbatasan sumber daya dan luasnya cakupan pengelolaan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya keterlibatan pemerintah secara intensif, pengelolaan beberapa destinasi wisata dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan kelompok pemuda setempat yang kemudian berkembang menjadi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memperlihatkan inisiatif dan kepedulian akan potensi wisata di daerahnya. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha juga didorong oleh adanya peluang ekonomi dan keyakinan terhadap besarnya potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Pacitan. Di sisi lain, media turut terlibat dalam pengembangan pariwisata karena adanya kepedulian untuk memperkenalkan potensi wisata Pacitan kepada masyarakat yang lebih luas.

Meskipun demikian, pada tahap awal pengembangan pariwisata masih ditemukan berbagai kendala berupa perbedaan pemahaman dan konflik antara masyarakat, pelaku wisata, dan pengelola destinasi. Konflik tersebut muncul karena sebagian masyarakat belum memahami tujuan pengembangan pariwisata serta manfaat yang dapat diperoleh dari sektor tersebut. Namun melalui komunikasi, sosialisasi, dan pendekatan yang dilakukan secara berkelanjutan, berbagai perbedaan tersebut dapat diminimalkan sehingga mendorong terciptanya kerja sama yang lebih baik antar *stakeholder*.

Berdasarkan uraian tersebut, kondisi awal pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya ketergantungan antar *stakeholder* yang cukup kuat. Potensi wisata yang besar, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengelola seluruh destinasi wisata, serta adanya kepentingan ekonomi dan sosial dari masing-masing aktor menjadi faktor yang mendorong terbentuknya kolaborasi dalam pengembangan pariwisata.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) pada aspek kondisi awal. Teori tersebut menjelaskan bahwa kolaborasi muncul karena adanya ketergantungan sumber daya, perbedaan kepentingan, serta kondisi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, Pokdarwis, dan media memiliki sumber daya serta kepentingan yang berbeda, namun saling membutuhkan dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, adanya konflik dan perbedaan pemahaman pada tahap awal juga mendukung pandangan Ansell dan Gash bahwa kondisi awal kolaborasi sering kali diawali oleh perbedaan kepentingan yang kemudian dikelola melalui proses interaksi dan kerja sama.

Temuan penelitian ini sama dengan penelitian (Wahyuni, 2023) bahwa pengembangan pariwisata melibatkan berbagai *stakeholder* sejak tahap awal melalui dukungan pemerintah, masyarakat, dan kelompok pengelola wisata. Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian (Sudirman et al., 2022) yang menemukan bahwa kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berawal dari keterlibatan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan sumber daya berbeda. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pada konteks Kabupaten Pacitan, inisiatif masyarakat melalui kelompok pemuda dan Pokdarwis telah muncul sebelum adanya keterlibatan pemerintah secara lebih intensif, sehingga menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki peran yang besar dalam membentuk kondisi awal pengembangan pariwisata.

Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam pelaksanaan *collaborative governance* pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan menunjukkan peran dengan cukup dominan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan sebagai aktor penggerak kolaborasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, namun juga sebagai fasilitator yang membangun komunikasi antar *stakeholder* melalui forum koordinasi rutin, pembinaan, pelatihan, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata. Adanya rapat koordinasi bulanan yang melibatkan Pokdarwis, pelaku usaha, BUMDes, dan pengelola wisata menunjukkan

bahwa pemerintah berupaya menciptakan ruang komunikasi yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, kepemimpinan pemerintah juga terlihat dari upaya penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada kelompok pengelola wisata maupun pelaku usaha. Dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana wisata, promosi destinasi melalui kegiatan *Table Top*, serta keterlibatan media dalam penyebarluasan informasi pariwisata menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dijalankan tidak hanya berorientasi pada koordinasi, sekaligus pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas *stakeholder*. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi antar pihak dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan uraian tersebut, kepemimpinan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan *collaborative governance*. Kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi, memediasi kepentingan berbagai pihak, serta memberikan dukungan kepada *stakeholder* menjadi faktor yang mendorong terciptanya sinergi yang lebih efektif dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Hasil penelitian ini sama dengan teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash yang menempatkan kepemimpinan sebagai unsur penting dalam mengarahkan para pemangku kepentingan menuju proses kolaborasi. Kepemimpinan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda serta membangun semangat kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, mediator, dan koordinator telah mendukung terlaksananya proses kolaborasi sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Rahman et al. (2023) yang menemukan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh peran pemerintah sebagai penghubung dan koordinator antar *stakeholder*. Namun, penelitian ini menunjukkan temuan yang lebih spesifik, yaitu kepemimpinan pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui koordinasi, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas wisata, serta fasilitasi promosi destinasi yang melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Pacitan.

Desain Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian, desain kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan telah didukung oleh adanya aturan dan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama antar pemangku kepentingan. Keberadaan RIPPARDA, SK Desa

Wisata, Peraturan Desa (Perdes), AD/ART, serta SOP yang dimiliki Pokdarwis menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak dilaksanakan secara spontan, melainkan berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Kejelasan aturan tersebut memberikan arah bagi setiap aktor dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sehingga mampu mengurangi potensi konflik dalam pengelolaan destinasi wisata.

Selain adanya aturan formal, desain kelembagaan juga ditunjukkan melalui keterlibatan para *stakeholder* dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pokdarwis bukan hanya terlibat dalam pelaksana program wisata, melainkan juga dilibatkan dalam penyusunan Perda maupun penyusunan rencana pembangunan pariwisata jangka panjang. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku, khususnya terkait kebersihan dan pengelolaan kawasan wisata. Namun demikian, keterlibatan media masih cenderung bersifat informal karena kerja sama yang dilakukan lebih banyak berdasarkan kebutuhan kegiatan atau *event* tertentu dan belum didukung oleh dokumen kerja sama yang formal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa desain kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan telah berjalan cukup baik karena didukung oleh aturan yang jelas, struktur organisasi yang terbentuk, serta mekanisme partisipasi yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Meskipun demikian, penguatan kerja sama formal dengan media masih perlu dilakukan agar proses kolaborasi dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini selaras dengan teori *Collaborative Governance* Ansell & Gash, (2008) pada aspek *institutional design* atau desain kelembagaan. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh adanya aturan dasar yang jelas, keterbukaan partisipasi, serta prosedur yang mampu menjamin keterlibatan berbagai pihak dalam proses penentuan keputusan. Dalam penelitian ini, keberadaan RIPPARDA, Perdes, SK Desa Wisata, serta keterlibatan Pokdarwis dalam penyusunan kebijakan menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang diterapkan telah mendukung terwujudnya proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan penelitian Wahyuni (2023) yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan dukungan kebijakan, aturan, dan keterlibatan *stakeholder* dalam proses pengelolaannya. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sudirman et al. (2022) yang menemukan adanya keterlibatan

berbagai aktor dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata melalui mekanisme kolaboratif. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan temuan Rahman et al. (2023) yang menunjukkan bahwa *collaborative governance* belum berjalan optimal akibat lemahnya tujuan bersama dan koordinasi antar aktor. Pada penelitian di Kabupaten Pacitan, aturan dan mekanisme partisipasi sudah terbentuk dengan cukup baik, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek formalisasi kerja sama dengan media.

Kolaboratif

Berdasarkan hasil penelitian, proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan telah berjalan melalui berbagai mekanisme koordinasi yang melibatkan pemerintah, Pokdarwis, pelaku usaha, masyarakat, media, dan pihak terkait lainnya. Bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi rutin setiap bulan, forum komunikasi, grup koordinasi antar pelaku wisata, serta kegiatan promosi bersama seperti *Table Top* dan *Pacitan Tourism Awards*. Forum-forum tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan permasalahan, mencari solusi bersama, memperkuat komunikasi, serta membangun hubungan kerja sama antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Selain itu, proses kolaborasi juga ditunjukkan melalui adanya komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Seluruh pihak menyadari bahwa kepuasan wisatawan akan memengaruhi citra destinasi wisata dan berdampak pada kunjungan wisatawan di masa mendatang. Keterbukaan terhadap keterlibatan investor, dukungan promosi dari pemerintah kepada pelaku usaha, serta partisipasi aktif pelaku usaha dalam mempromosikan wisata Pacitan menunjukkan bahwa hubungan antar *stakeholder* tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dampak dari proses kolaborasi tersebut terlihat pada semakin luasnya jaringan promosi wisata, meningkatnya peluang kerja sama, munculnya berbagai prestasi destinasi wisata, serta terbukanya peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan telah berjalan secara optimal karena didukung oleh komunikasi yang intensif, komitmen bersama, serta keterlibatan aktif berbagai *stakeholder*. Kolaborasi yang terjalin tidak hanya digunakan sebagai sarana penyelesaian masalah, melainkan juga menjadi wadah untuk memperkuat promosi, membangun jaringan, dan meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, (2008) pada aspek *collaborative process*. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa proses kolaborasi ditandai adanya interaksi langsung, penguatan kepercayaan, komitmen terhadap

proses, dan pemahaman yang kuat tentang hal-hal yang terjadi, serta hasil antara (*intermediate outcomes*). Dalam penelitian ini, rapat koordinasi rutin, forum komunikasi antar pelaku wisata, keterbukaan terhadap kerja sama, serta berbagai prestasi yang diperoleh destinasi wisata menunjukkan bahwa unsur-unsur proses kolaboratif tersebut telah terwujud dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Pada hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sudirman et al. (2022) dan Wahyuni (2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata didukung oleh dialog, koordinasi, komitmen, dan kerja sama antar *stakeholder*. Penelitian ini juga sejalan dengan Supriyanto et al. (2024) yang menemukan bahwa kolaborasi antar aktor *Pentahelix* memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Namun, pada hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahman et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa proses *collaborative governance* belum berjalan optimal karena lemahnya kepercayaan dan koordinasi antar aktor. Pada penelitian ini, koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* sudah berlangsung secara rutin melalui berbagai forum sehingga mampu mendukung pengembangan pariwisata secara lebih efektif.

Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Pacitan

Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan *collaborative governance* pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan berasal dari besarnya potensi wisata yang dimiliki daerah, dukungan dari berbagai *stakeholder*, serta terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang cukup baik antar aktor terkait. Potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang dimiliki Kabupaten Pacitan menjadi daya tarik yang mendorong keterlibatan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, investor, media, serta kelompok sadar wisata dalam mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pembangunan dan penataan kawasan wisata, keterlibatan investor dalam penyediaan fasilitas wisata, serta partisipasi masyarakat dan pelaku UMKM turut memperkuat upaya pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah Kabupaten Pacitan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan jaringan kolaborasi antar *stakeholder* menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata. Hubungan kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah, Pokdarwis, pelaku usaha, biro perjalanan wisata, investor, dan media memudahkan proses koordinasi, promosi, serta pengembangan fasilitas pendukung wisata. Komunikasi lintas sektor yang berjalan cukup baik

memungkinkan adanya pertukaran informasi mengenai kegiatan pariwisata, promosi destinasi, dan berbagai program pengembangan wisata yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya potensi wisata yang tidak hanya dimiliki oleh kemampuan para *stakeholder* dalam membangun kerja sama dan memanfaatkan potensi tersebut secara bersama-sama. Integrasi antar pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah. Hasil penelitian ini selaras dengan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, (2008), khususnya pada aspek kondisi awal dan proses kolaboratif. Potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang dimiliki Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya sumber daya yang menjadi modal awal dalam pelaksanaan kolaborasi.

Sementara itu, dukungan dari berbagai *stakeholder*, komunikasi lintas sektor, serta jaringan kerja sama yang terjalin menunjukkan adanya proses kolaboratif yang ditandai dengan partisipasi, koordinasi, dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata. Dengan demikian, temuan pada penelitian ini mendukung pandangan Ansell dan Gash bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal yang mendukung serta proses interaksi yang baik antar pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Supriyanto et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan didukung oleh keterlibatan aktor pentahelix yang menjalankan peran masing-masing dalam pengembangan destinasi wisata. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Wahyuni (2023) yang menemukan bahwa dukungan pemerintah, masyarakat, dan kelompok pengelola wisata menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan pariwisata. Namun demikian, penelitian ini menemukan secara lebih spesifik bahwa keberadaan potensi wisata alam, budaya, ekonomi kreatif, serta dukungan media dan jaringan kolaborasi antar *stakeholder* menjadi faktor pendukung utama yang memperkuat pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan *collaborative governance* pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan berasal dari berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun dukungan sumber daya lainnya. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah perbedaan pola pikir (*mindset*) antar *stakeholder*. Perbedaan pemahaman antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menyebabkan belum

optimalnya keterbukaan serta partisipasi dalam mendukung pengembangan pariwisata. Kondisi ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang enggan memberikan data terkait tingkat hunian wisatawan karena adanya kekhawatiran terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, masalah keterbatasan sumber daya manusia pada instansi pemerintah juga menjadi kendala karena peningkatan beban kerja belum diimbangi dengan jumlah personel yang memadai.

Selain faktor sumber daya manusia, hambatan lain yang cukup dominan adalah kondisi akses menuju destinasi wisata yang masih belum optimal. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Pacitan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan sehingga memengaruhi kenyamanan dan kemudahan wisatawan dalam berkunjung. Keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas pendukung wisata juga menjadi kendala, terutama pada kawasan wisata yang sebagian besar lahannya telah dimiliki oleh masyarakat. Di sisi lain, faktor alam seperti curah hujan yang tinggi turut memengaruhi aktivitas wisata dan pendapatan pelaku usaha. Hambatan lainnya juga ditemukan pada aspek promosi wisata, yaitu keterbatasan anggaran, waktu, serta sumber daya yang dimiliki media dalam memproduksi dan menyebarkan konten promosi wisata, khususnya untuk destinasi yang berada di wilayah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan uraian tersebut, berbagai hambatan yang muncul dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan pada dasarnya menunjukkan bahwa proses kolaborasi antar *stakeholder* masih memerlukan penguatan, terutama dalam membangun pemahaman bersama, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat dukungan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Hasil penelitian ini selaras dengan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, (2008), khususnya pada aspek kondisi awal dan proses kolaboratif. Adanya perbedaan pola pikir, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kurangnya keterbukaan sebagian *stakeholder* menunjukkan bahwa kondisi awal kolaborasi belum sepenuhnya ideal.

Selain itu, kendala dalam komunikasi, penyediaan data, dan dukungan sumber daya menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang meliputi pembangunan kepercayaan dan komitmen bersama masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, temuan penelitian ini mendukung teori Ansell dan Gash yang menyatakan bahwa dalam keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh kondisi awal para *stakeholder* dan kualitas proses interaksi yang terbangun selama kolaborasi berlangsung.

Pada temuan penelitian, penelitian ini selaras dengan penelitian Rahman et al. (2023) yang menemukan bahwa pengembangan pariwisata menghadapi hambatan berupa rendahnya kepercayaan antar aktor, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya proses berbagi informasi. Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian Ashgaf & Giriwati, (2024) yang

menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang belum optimal menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata. Namun demikian, penelitian ini menemukan hambatan yang lebih spesifik pada konteks Kabupaten Pacitan, yaitu permasalahan akses menuju destinasi wisata, keterbatasan lahan pengembangan kawasan wisata, faktor cuaca, serta keterbatasan anggaran promosi yang turut memengaruhi efektivitas *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan telah berjalan sesuai dengan teori Ansell dan Gash melalui aspek kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, proses kolaboratif, serta faktor pendukung dan penghambat. Pada kondisi awal, pengelolaan pariwisata masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya dukungan pemerintah dan rendahnya pemahaman masyarakat sehingga sinergi antar aktor belum maksimal. Dari aspek kepemimpinan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan berperan aktif melalui koordinasi, fasilitasi, pembangunan destinasi, dan pelatihan bagi pelaku wisata. Aspek desain kelembagaan didukung oleh regulasi yang jelas, seperti RIPPARDA, SK Desa Wisata, Perdes, AD/ART, dan SOP sebagai pedoman pengelolaan pariwisata. Pada aspek kolaboratif, pemerintah mendorong kerja sama melalui kegiatan *Table Top* dan *Pacitan Tourism Award* yang memperkuat jejaring serta apresiasi bagi pelaku wisata. Sementara itu, faktor pendukung utama berupa besarnya potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang dimiliki Kabupaten Pacitan, sedangkan faktor penghambat meliputi perbedaan pola pikir antar pemangku kepentingan dan keterbatasan infrastruktur jalan. Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan memiliki peluang besar untuk berkembang secara berkelanjutan apabila didukung oleh peningkatan sinergi *stakeholder*, kapasitas masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, R., Supriyono, B., & C, T. D. (2022). *Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 170–177. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>
- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). *Collaborative governance dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(2), 112–127. <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i2.748>
- Ashgaf, I. M., & Giriwati, N. S. S. (2024). *Partisipasi berbasis masyarakat dalam pembangunan di Pantai Watukarung Pacitan*. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3). <https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.381>
- Hanaf, M. (2022). *Pengembangan pariwisata melalui collaborative governance di Kabupaten Magelang*. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v19i1.53447>
- Ismail, H., Wahyudi, E., & Puspaningtyas, A. (2023). *Collaborative governance dalam pembangunan inklusif wisata*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 171–178. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8260>
- Kemenpar. (2025). *Tourism snapshot*, 1(1), 1–7.
- Moreta, A., & MS, Z. H. (2023). *Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada tahun 2021–2022*. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(3). <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.180>
- Nugraha, R. N., Mulya, M. H., Putra, E. S., Alamsyah, A. A., & Jhanufa, A. B. I. (2023). *Keberagaman budaya Yogyakarta sebagai destinasi wisata budaya unggulan*. 9(25), 771–780.
- Putra, A., As'ari, H., & Adianto. (2022). *Collaborative governance dalam pengembangan objek wisata di Rupa Utara Kabupaten Bengkulu*. *Journal Publicuho*, 5(4), 1149–1161. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.54>
- Putri, N. M. A. S., Purnamaningsih, P. E., & Supriyanti, N. W. (2024). *Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan*. *Business and Investment Review*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.61292/birev.92>
- Rahman, A. F. B., Amil, & Zitri, I. (2023). *Collaborative governance dalam perkembangan pariwisata di kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat*. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 144–159. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.919>
- Saputra, P. R., Lendra, I. W., Destriana, I., & Wahyuni, F. (2022). *Pengembangan wisata dan ekonomi kreatif Lampung dalam perspektif collaborative governance*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 13(1), 33–48. <https://doi.org/10.23960/administratio.v13i1.278>
- Savitri, A. A. D., Wijaya, K. A. S., & Prabawati, N. P. A. (2024). *Pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui collaborative governance di Desa Wisata Penglipuran*. *Socio-Political Communication and Policy*, 1(5), 1–13. <https://doi.org/10.61292/shkr.169>
- Septiana, A. R. (2025). *Analisis pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan*. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan*, 4(April), 445–453. <https://doi.org/10.36441/snkp.vol4.2025.361>

- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & Tarifu, L. (2022). *Tata kelola kolaboratif (collaborative governance) pembangunan pariwisata Bajo Mola Wakatobi*. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 114–132. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.335>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.). Alfabeta.
- Supriyanto, A., Kusbandrijo, B., & Widodo, J. (2024). *Tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan*. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(45), 21–34. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.680>
- Wahyuni, S. (2023). *Collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Rantau Langsar di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu*. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.991>
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan*. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58108>
- Yasinta, P. N. (2020). *Collaborative governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>